

SERANGAN UMUM 1 MARET

Pengerahan Pasukan di Yogyakarta

Serangan Umum 1 Maret adalah serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara besar-besaran yang telah direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah GM III dengan mengikutsertakan beberapa pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi langsung dari Panglima Besar Sudirman untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI berarti juga Republik Indonesia masih ada dan cukup kuat keberadaannya, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang berlangsung di Dewan Keamanan PBB, serta bertujuan juga untuk mematahkan moral pasukan Belanda. Soeharto pada waktu itu diposisikan sebagai komandan brigade X / Wehrkreis III serta sebagai pelaksana komando lapangan di wilayah Yogyakarta.

TNI mulai menjalankan strategi guna melakukan serangan balik terhadap tentara Belanda yang dimulai dengan memutuskan telepon, merusak jalan kereta api, menyerang konvoi Belanda, serta tindakan sabotase lainnya. Belanda terpaksa memperbanyak pos-pos di sepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan antar kota-kota yang telah diduduki. Hal ini berarti kekuatan pasukan Belanda tersebar pada pos-pos kecil diseluruh daerah yang kini merupakan medan gerilya. Keadaan pasukan Belanda yang sudah terpencar-pencar, mulailah TNI melakukan serangan terhadap Belanda. Letkol Dr. Wiliater Hutagalung merupakan Perwira Teritorial yang telah ditugaskan untuk membentuk jaringan persiapan gerilya di wilayah Divisi II dan III. Ia juga yang melapor kepada Sudirman tentang resolusi Dewan Keamanan PBB dan segera menyangkal adanya propaganda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi.

Sudirman menginstruksikan untuk memikirkan langkah-langkah yang harus diambil guna menangkal propaganda Belanda. Hutagalung yang membentuk jaringan di wilayah Divisi II dan III menjadi penghubung antara Panglima Besar Sudirman dengan Panglima Divisi II Kolonel Gatot Subroto dan Panglima Divisi III Kol. Bambang Sugeng. Sebagai dokter spesialis paru, ia juga merawat Panglima Besar Sudirman yang saat itu menderita penyakit paru-paru. Pada bulan September dan Oktober 1949, Hutagalung dan keluarga tinggal di Paviliun rumah Panglima Besar Sudirman di Jl. Widoro No. 10, Yogyakarta (Heijbroer, 1998: 78). Pemikiran yang dikembangkan oleh Hutagalung adalah perlu meyakinkan dunia internasional terutama Amerika Serikat dan Inggris, bahwa Negara Republik Indonesia masih ada dan memiliki kekuatan, ditambah masih punya pusat pemerintahan PDRI, organisasi TNI beserta banyak personilnya.

Dalam rangka membuktikan hal tersebut di mata internasional, maka diadakan serangan spektakuler yang tidak bisa disembunyikan oleh Belanda dan harus diketahui oleh *United Nations Commission for Indonesia* (UNCI) dan wartawan-wartawan asing untuk disebarluaskan ke seluruh dunia. Untuk mendukung rencana tersebut, dilibatkan pula pemuda-pemuda berseragam Tentara Nasional Indonesia yang dapat berbahasa Inggris, Belanda, atau Perancis. Lalu, pada rapat Pimpinan Tertinggi Militer dan Sipil di wilayah Gubernur Militer III tanggal 18 Februari 1949 di markas yang terletak di lereng Gunung Sumbing bersama Kol. Bambang Sugeng, Letkol Wiliater Hutagalung, Letkol. Sarbini Martodiharjo, Gubernur Sipil Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro, Residen Banyumas Budiono, Residen Kedu Salamun, Bupati Banjarnegara Sumitro Kolopaking, dan Bupati Sangidi untuk membahas gagasan strategi Hutagulung yang sudah disetujui Sudirman.

Beberapa isi pembahasannya yaitu:

1. Serangan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Divisi III, yang melibatkan Wehrkreise I, II dan III.
2. Menggerakkan seluruh potensi militer dan sipil di bawah komando Gubernur Militer III.
3. Mengadakan serangan yang spektakuler terhadap satu kota besar wilayah Divisi III.
4. Harus berkoordinasi dengan Divisi II agar memperoleh efek lebih besar.
5. Serangan tersebut harus diketahui dunia internasional, untuk itu perlu mendapat dukungan dari Wakil Kepala Staf Angkatan Perang guna berkoordinasi dengan pemancar radio yang dimiliki oleh AURI dan Koordinator Pemerintah Pusat, lalu dukungan Unit Pendidikan Politik Tentara (PEPOLIT) Kementerian Pertahanan.

Panglima Divisi III / GM III Kolonel Bambang Sugeng bersikukuh bahwa yang harus diserang secara spektakuler adalah Kota Yogyakarta.

Tiga alasan penting yang dikemukakan Bambang Sugeng memilih Kota Yogyakarta sebagai sasaran utama adalah sebagai berikut:

1. Yogyakarta adalah Ibu kota RI, sehingga bila dapat direbut walau hanya untuk beberapa jam, akan berpengaruh besar terhadap perjuangan Indonesia melawan Belanda.
2. Keberadaan banyak wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta, serta masih adanya anggota delegasi UNCI dan KTN serta pengamat militer dari PBB.
3. Langsung di bawah wilayah Divisi III / GM III sehingga tidak perlu persetujuan Panglima / GM lain, bahkan semua pasukan memahami dan telah menguasai situasi kondisi di daerah operasi. Seluruh Divisi III pada dasarnya dapat dikatakan telah terlatih dalam melakukan penyerangan pada pertahanan tentara Belanda di wilayah Kota Yogyakarta.

Dunia internasional harus mengetahui adanya Serangan TNI terhadap tentara Belanda, terutama terhadap Kota Yogyakarta. Dalam penyebaran berita ini ke dunia internasional dibantu oleh Kol. T.B. Simatupang yang bermarkas di desa Banjarsari untuk dapat menghubungi pemancar radio Angkatan Udara RI (AURI) di Playen dekat Wonosari agar setelah serangan dilancarkan berita mengenai penyerangan besar-besaran oleh TNI atas Yogyakarta segera disiarkan. Sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, Simatupang dinilai lebih kompeten untuk menyampaikan hal ini kepada pihak AURI daripada perwira Angkatan Darat lainnya. Apabila Belanda melihat bahwa Kota Yogyakarta diserang secara besar-besaran, diperkirakan mereka akan mendatangkan bantuan dari kota-kota lain di Jawa Tengah, dimana terdapat pasukan-pasukan Belanda yang kuat seperti Magelang, Semarang, dan Solo.

Perkiraan Jarak tempuh pada saat itu dari Magelang ke Yogyakarta sekitar 3-4 jam, sementara dari Solo ke Yogyakarta sekitar 4-5 jam, dan dari Semarang ke Yogyakarta sekitar 6-7 jam. Magelang dan Semarang (bagian Barat) berada di wilayah kewenangan Divisi III / GM III, namun Solo di bawah wewenang Panglima Divisi II / GM II Kolonel Gatot Subroto. Oleh karena itu, serangan di wilayah Divisi II dan III harus dikoordinasikan dengan baik sehingga dapat dilakukan operasi militer bersama dalam kurun waktu yang ditentukan, sehingga bantuan Belanda dari Solo dapat dihambat, atau paling tidak dapat diperlambat (Marsoedi, 1988: 12).

Perintah yang sangat penting dan rahasia harus disampaikan langsung oleh atasan kepada komandan pasukan yang bersangkutan, sehingga rencana penyerangan atas Kota Yogyakarta di wilayah Wehrkreise I yang dipimpin Letkol Suharto disampaikan langsung oleh Kolonel Bambang Sugeng.

Kurir dikirim kepada Komandan Wehrkreise III / Brigade 10 Letkol Suharto untuk memberitahu kedatangan Panglima Divisi III dan persiapan untuk pertemuan. Rombongan Panglima Divisi selain Letkol Dr. Hutagalung, juga Dr. Kusen, Bambang Surono, seorang mantri kesehatan, seorang supir, Letnan Amron Tanjung dan beberapa anggota staf Gubernur Militer (GM) serta pengawal. Pertama-tama, rombongan singgah di tempat Kolonel Wiyono dari PEPOLIT yang bermarkas tidak jauh dari markas Panglima Divisi. Lalu segera memberikan tugas untuk mencari pemuda berbadan tinggi dan tegap serta fasih berbahasa Belanda, Inggris, atau Prancis yang akan diberi pakaian perwira TNI. Menjelang sore hari, Panglima Divisi beserta rombongan tiba Banaran mengunjungi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel Simatupang. Pertemuan tersebut juga ada Mr. M. Ali Budiarjo seorang yang menjadi ipar dari Simatupang.

Brigade IX komando Letkol Achmad Yani, diperintah melakukan penghadangan terhadap bantuan Belanda dari Magelang ke Yogyakarta. Panglima Divisi dan rombongan meneruskan perjalanan yang selalu dilakukan pada malam hari dan beristirahat pada siang hari, untuk menghindari patroli Belanda. Penunjuk jalan juga selalu berganti di setiap desa. Lalu, setelah dari Banaran, rombongan melanjutkan menuju wilayah Wehrkreise III melalui pegunungan Menoreh untuk menyampaikan perintah kepada Komandan Wehrkreis III Letkol Suharto. Bambang Sugeng beserta rombongan sempat mampir di Pengasih. Saat pertemuan dengan Letkol Suharto yang berlangsung di sebuah gubug di tengah sawah daerah Brosot dekat Wates. Hadir dalam pertemuan tersebut lima orang, yaitu Kolonel Bambang Sugeng, Letkol Dr. Wiliater Hutagalung, Letnan Amron Tanjung, Letkol Suharto, dan ajudannya yang tidak diketahui namanya.

Kepada Suharto diberikan perintah untuk mengadakan penyerangan antara tanggal 25 Februari dan 1 Maret 1949. Kepastian tanggal baru dapat ditentukan kemudian, setelah koordinasi serta kesiapan semua pihak terkait, antara lain dengan Kolonel Wiyono. Setelah semua persiapan matang, baru kemudian diputuskan bahwa serangan tersebut akan dilancarkan tanggal 1 Maret 1949 pukul 06.00 pagi. Instruksi segera diteruskan ke semua pihak yang terkait.

Komando Serangan dari Jenderal Sudirman

Pada pelaksanaannya, ternyata Sri Sultan HB IX pada awal bulan Februari sudah berkirim surat kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk mengadakan serangan umum tetapi pada waktu siang hari. Jenderal Sudirman menyetujui usulan tersebut, lalu Sri Sultan HB IX diminta untuk langsung berkoordinasi dengan komandan WK III yaitu Letkol Soeharto (Suwarno,1994:246).

Puncak serangan dilakukan dengan serangan umum terhadap kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 dibawah pimpinan Letkol Suharto selaku Komandan Brigade 10 Wehrkreise III setelah sebelumnya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun Sri Sultan HB IX dikenai sebagai tahanan rumah oleh Belanda di Keraton, namun beliau tidak tinggal diam, justru diam-diam menunjukkan bahwa ia sangat mencintai Republik Indonesia dan ingin segera mengusir Belanda yang telah bercokol lama sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaanya. Adanya saluran radio yang ada di Keraton membuat Sri Sultan sangat leluasa mengikuti perkembangan internasional, khususnya mengenai perjuangan Indonesia dalam forum diplomasi di PBB. Menurut berita yang didengar Sri Sultan, PBB akan mengadakan sidang mengenai masalah Indonesia-Belanda pada akhir Februari 1949.

Berita tersebut menjadi acuan pemikiran dalam benak Sri Sultan untuk memberitahukan kepada dunia internasional bahwa RI tidak musnah seperti yang digambarkan oleh pihak Belanda. Sejak Belanda menguasai Kota Yogyakarta memang selalu menggambarkan kepada pihak internasional bahwa RI telah hancur dan TNI telah musnah, padahal sejatinya RI tetap berdaulat dengan pemerintahan darurat di Sumatera, sementara TNI terus bergerilya.

Tanggal 1 Maret 1949 serangan secara besar-besaran serentak dilakukan di seluruh wilayah Divisi III / GM III yang terpusat di Kota. Sementara itu dilakukan pula serangan terhadap pertahanan Belanda di Magelang dan penghadangan jalur sekitar menuju Yogyakarta sesuai Instruksi Rahasia yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi III / GM III Kolonel Bambang Sugeng kepada Komandan Wehrkreis I Letkol Bahrin dan Komandan Wehrkreis II Letkol Sarbini.

Pada saat bersamaan pula, serangan dilakukan di wilayah Divisi II / GM II yang berpusat di kota Solo agar menyibukkan tentara Belanda dalam pertempuran sehingga tidak dapat mengirimkan bantuan ke Yogyakarta. Malam hari sebelum menjelang serangan umum itu, pasukan dalam jumlah besar telah merayap mendekati kota dan beberapa pasukan dalam jumlah kecil mulai disusupkan ke dalam kota. Saat pagi hari sekitar jam 06.00 sewaktu sirene dibunyikan serangan segera dilancarkan ke segala penjuru kota. Letkol Soeharto langsung memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro. Sektor Timur dipimpin Ventje Sumual, sektor selatan dan timur dipimpin Mayor Sardjono, sektor utara oleh Mayor Kusno. Sektor kota ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki sebagai pimpinan. TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12.00 siang, sesuai strategi semula pasukan TNI mulai menarik diri atau mundur.

Serangan terhadap kota Solo yang juga dilakukan secara besar-besaran dapat menahan Belanda tetap di Solo sehingga tidak dapat mengirim bantuan dari Solo ke Yogyakarta. Sementara yang dilakukan oleh Brigade IX hanya dapat memperlambat gerak pasukan bantuan Belanda dari Magelang ke Yogyakarta. Tentara Belanda dari Magelang dapat menerobos hadangan gerilyawan dan akhirnya sampai di Yogyakarta sekitar pukul 11.00. Pada dasarnya keberhasilan yang dicapai dalam Serangan umum 1 Maret 1949 adalah dapat membangkitkan semangat juang dan rasa percaya terhadap eksistensi TNI. Kepercayaan dan semangat juang itu akan mempengaruhi rakyat untuk tetap terjaga dan bersatu melawan Belanda, serta turut membantu TNI selama mengadakan perang Gerilya. Tiba-tiba beberapa saat setelah serangan militer, Dr. Beel selaku Wakil Mahkota Agoeng di Batavia melakukan siaran pers.

Dr. Beel menyatakan bahwa Belanda sudah tidak lagi terikat dengan perjanjian gencatan senjata dengan Republik Indonesia melalui perjanjian Renville. Belanda menganggap pihak Indonesia tidak pernah bersedia menghormati gencatan senjata dan sering melakukan pelanggaran pada wilayah yang diduduki oleh Belanda. Serangan 1 Maret 1949 oleh TNI secara besar-besaran terhadap Kota Yogyakarta inilah yang dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret. Serangan balik untuk membalas propaganda Belanda ini telah berhasil membuktikan kepada dunia Internasional bahwa TNI atau Republik Indonesia masih ada dan cukup kuat melakukan perlawanan terhadap Belanda. Serangan umum yang dilakukan tersebut sudah cukup membuat moral pasukan Belanda menurun dan dapat membuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB menjadi lebih kuat.

Agresi Militer Belanda II pada dasarnya menuai kecaman keras dari beberapa Negara di Asia. Atas inisiatif dari Burma, Perdana Menteri India Jawaharlal Pandit Nehru mulai mengadakan konferensi Asia di India yang dihadiri oleh 19 Negara dengan rincian 4 negara sebagai peninjau yaitu China, Thailand, Nepal dan Selandia Baru, lalu 15 Negara peserta penuh yaitu Afganistan, Australia, Burma, Sri Lanka, Mesir, Ethiopia, India, Irak, Iran, Libanon, Filipina, Pakistan, Arab Saudi, Syria, dan Yaman. Konferensi yang diselenggarakan dari tanggal 20 sampai dengan 23 Januari 1949 bertujuan untuk memberikan dukungan politik dan moril bagi perjuangan rakyat Indonesia yang sedang mati-matian mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Negara-negara peserta konferensi mengutuk Agresi Militer Belanda karena jelas merupakan pelanggaran semangat piagam PBB melalui jasa KTN untuk mencari penyelesaian konflik secara damai dengan Indonesia.

Konferensi Asia ini menghasilkan tiga resolusi untuk dapat mengatasi konflik perang yang sedang berlangsung di Indonesia, kemudian disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti. Resolusi pertama adalah menguatkan dukungan terhadap semua tujuan dan asas PBB. Resolusi kedua ditujukan kepada semua Negara baik semua anggota maupun bukan anggota PBB untuk senantiasa memelihara hubungan antar negara satu sama lain melalui saluran diplomatik yang lazim serta agar wakil-wakil mereka di Markas Besar PBB dan para diplomat mereka untuk selalu mengedepankan cara perundingan. Resolusi ketiga menganjurkan agar seluruh pemerintahan negara dan wakil-wakilnya yang mengikuti konferensi selalu berkonsultasi satu sama lain untuk menemukan cara mengatasi masalah dalam rangka usaha PBB menyelesaikan sengketa antara Indonesia dengan Belanda.

Konferensi Meja Bundar (KMB)

Akibat Agresi Militer Belanda II ke Yogyakarta, dunia Internasional termasuk Amerika Serikat mengancam akan menghentikan bantuan mereka kepada pihak Belanda, melakukan tekanan, dan juga memaksa Belanda untuk mengadakan perundingan kembali dengan Indonesia. Akibat tekanan tersebut dan juga kelelahan dalam melawan kegiatan gerilya militer yang dilakukan oleh TNI, maka Belanda akhirnya bersedia melakukan perundingan dengan Republik Indonesia. Pada tanggal 14 April 1949, Belanda dan Indonesia telah melakukan perundingan secara damai di Jakarta terlebih dahulu untuk menyelesaikan beberapa persoalan mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum melaksanakan rencana digelarnya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Inti dari perundingan tersebut pada dasarnya adalah pernyataan kesediaan damai antara kedua belah pihak.

Perundingan secara damai tersebut akhirnya ditandatangani oleh Mr. Mohammad Roem dan Dr. J.H. van Rooijen pada tanggal 7 Mei 1949. Perundingan itu kemudian lebih dikenal dengan nama Persetujuan Roem-Roeijin. Pada isi Persetujuan itu, pihak Delegasi Republik Indonesia menyatakan kesediaannya untuk:

1. Mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya.
2. Bekerjasama mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
3. Turut serta dalam KMB di Den Haag, untuk dapat mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat (Muljana, 2008: 227).

Sedangkan pihak Delegasi Belanda saat itu menyatakan kesediaannya untuk:

1. Menyetujui kembalinya Pemerintahan RI ke Yogyakarta.

2. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik.

3. Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum 19 Desember 1948 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan pihak RI.

4. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat (NIS).

5. Berusaha dengan sungguh-sungguh supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1985: 210-211).

Namun, hasil Persetujuan Roem-Roijen ini juga mendapat reaksi yang beragam dari berbagai pihak di Indonesia. Reaksi yang cukup keras datang dari pihak militer yaitu TNI dan pemerintahan sementara yaitu PDRI.

Persetujuan tentang pengembalian kekuasaan pemerintah Republik Indonesia atas daerah Yogyakarta membuat perlu adanya perhatian pada tindakan terhadap beberapa hal berikut:

1. Pembentukan sebuah pemerintahan nasional resmi yang akan berfungsi juga sebagai Pemerintahan Sementara sampai terbentuknya Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS).
2. Proses penyerahan kedaulatan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu, termasuk status Uni-Indonesia dalam perjanjian-perjanjian sementara (Nasution, 1973: 290).

Terbentuknya RIS dan Kembali Lagi ke NKRI

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Belanda masih merasa punya kekuasaan atas Hindia-Belanda sebagai wilayah bekas jajahan. Jadi setelah proklamasipun, Indonesia masih harus terus berjuang untuk mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda.

Setelah melalui beberapa kali perundingan, akhirnya bangsa Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda setelah melewati fase diadakannya KMB. Pengakuan dan penyerahan kedaulatan dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949 di tiga tempat yaitu Belanda, Jakarta, dan Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan, Republik Indonesia berganti nama menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan tidak lagi berbentuk negara kesatuan melainkan sebagai negara federal. Berdirinya negara Republik Indonesia Serikat dalam kerangka Konstitusi RIS tahun 1949 pasal 2 dinyatakan wilayah Indonesia mencakup wilayah yang disebut dalam Perjanjian Renville. Pada wilayah federal juga berlaku konstitusi RIS karena wilayah federal menjadi bagian dari RIS, tetapi dalam wilayah Republik Indonesia yang juga sebagai salah satu negara bagian dari RIS tetap berlaku konstitusi dalam UUD 1945 (Jimly Asshiddiqie, 2010: 36).

Sejak terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat di bawah kekuasaan Konstitusi RIS 1949 pada tanggal 27 Desember 1949, perjuangan bangsa Indonesia menentang susunan negara yang federalistik semakin kuat. Rakyat Indonesia menghendaki susunan negara yang unitaris (kesatuan). Bentuk dari penentangan tersebut dilakukan rakyat Indonesia dalam berbagai tuntutan dan terjadi di berbagai daerah karena faktor kesamaan pemikiran. Beberapa daerah bahkan sudah menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia yang resmi dibenarkan dalam UU Darurat No. 11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah Negara Republik Indonesia Serikat, LN No. 16 Tahun 1950 yang berlaku 9 Maret 1950. Undang-Undang Darurat tersebut sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 44 konstitusi RIS itu sendiri. Inti sari dari isi konstitusi yang melandasi dapat bergabungnya daerah-daerah adalah:

“Perubahan daerah dari suatu daerah-daerah bagian untuk masuk ke dalam suatu daerah atau menggabungkan diri kepada suatu daerah bagian yang telah ada, hanya boleh dilakukan oleh suatu daerah yang sendirinya bukan menjadi daerah bagian menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan UU Federal dengan menjunjung asas-asas seperti tersebut dalam Pasal 43, dan daripada hal itu mengenai masuk atau menggabungkan diri harus sesuai dengan persetujuan daerah bagian yang bersangkutan” (Soehino, 1992: 25).

Akibat dari adanya berbagai penggabungan ini, maka negara Republik Indonesia Serikat menjadi terdiri dari tiga negara bagian yaitu meliputi negara Republik Indonesia sendiri, negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Atas kejadian ini, maka kewibawaan pemerintahan dari negara federal menjadi berkurang dan sebagai solusinya maka diadakanlah sebuah permusyawaratan.

Permusyawaratan ini terjadi antara pemerintah negara Republik Indonesia Serikat dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia mewakili negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Gerakan menuju pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendapat dukungan yang kuat dan luas dari seluruh rakyat Indonesia. Banyak negara-negara bagian satu per satu menggabungkan diri dengan negara bagian Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, sehingga akhirnya hanya tinggal beberapa negara bagian saja, yaitu Republik Indonesia Yogyakarta, Indonesia Timur dan Sumatra Timur. Maka dari itu, keberdaulatan pemerintah RIS menjadi berstatus Negara Republik Indonesia dan Badan Pekerja menjadi berstatus Negara Bagian. Akhirnya, para elit yang ada di Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara Sumatera Timur (NST) tergerak juga untuk berunding dengan pemerintah RIS.

Pada tanggal 3 sampai 5 Mei 1950 diadakan perundingan antara PM-RIS Hatta, Presiden NIT Sukawati, dan Perdana Menteri NST Dr. Mansyur yang hasilnya adalah disetujuinya pembentukan suatu negara kesatuan. Pada tanggal 13 Mei 1950, Dewan Sumatera Timur menentang keputusan itu, namun masih bersedia menerima pembubaran RIS dengan syarat NST dileburkan ke dalam RIS bukan ke dalam RI. Walaupun ada dukungan kuat dari sebagian besar penduduk Sumatera Timur, tetapi PM Hatta tetap mendukung Dewan NST karena situasi di Sumatera Timur masih rapuh untuk bergabung RI. Sehubungan dengan hasil konferensi antara Hatta, Mansyur, dan Sukawati, maka sebagai tindak lanjut diadakan lagi perundingan antara PM-RIS Hatta yang mewakili NIT dan NST di satu pihak dan PM-RI A. Halim di pihak lainnya. Hasilnya adalah tercapainya persetujuan pada tanggal 19 Mei 1950 diantara kedua belah pihak untuk membentuk NKRI.

